



Pengaruh Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Pasca Covid-19

Azzah Miladia*

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 22/7/2024

Revised : 31/7/2024

Published : 31/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 73 - 78

Terbitan : **Juli 2024**

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia yang diukur dari tiga komponen yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM yang tidak merata dapat mengakibatkan permasalahan kependudukan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas wilayah terhadap IPM. Variabel yang digunakan diantaranya jumlah rumah sakit per luas wilayah, jumlah sekolah per luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin per luas wilayah, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan *Software Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah sekolah per luas wilayah berpengaruh signifikan karena jumlah sekolah di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat sudah memenuhi standar, sedangkan jumlah rumah sakit per luas wilayah tidak berpengaruh terhadap IPM karena jumlah rumah sakit per luas wilayah masih jauh dari standar yang ditetapkan. Jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM karena masih jauhnya akses atau jarak ke pusat pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : IPM, Luas wilayah, Jumlah Sekolah.

ABSTRACT

Community welfare can be seen through the Human Development Index which is measured from three components, namely health, education and decent living standards. Uneven HDI can result in population and social welfare problems. This research aims to determine the influence of area on HDI. The variables used include the number of hospitals per area, the number of schools per area, and the number of poor people per area, so it is hoped that they can be used to determine policies in increasing the Human Development Index in West Java Province. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. This research uses a quantitative approach method with panel data regression analysis using *Eviews 12 Software*. The results of the study show that the variable number of schools per area has a significant effect because the number of schools in 18 districts of West Java Province has met the standards, while the number of hospitals per area has no effect. on HDI because the number of hospitals per area is still far from the established standards. The number of poor people has no effect on HDI because there is still far access or distance to the center of economic growth.

Keywords : HDI, Area, Number of Schools.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Indeks Pembangunan Manusia merupakan perbandingan dari indeks kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak untuk menegaskan bahwa manusia dan kemampuannya menjadi kriteria utama dalam menilai pembangunan suatu negara (Anggraini, 2018; UNDP, 2023) Pembangunan di masyarakat setidaknya harus mempunyai tiga tujuan yaitu meningkatkan ketersediaan dan memperluas pemerataan kebutuhan hidup, meningkatkan standar hidup, dan perluasan pilihan ekonomi dan sosial (Todaro & Smith, 2011). Indeks Pembangunan Manusia dibangun menggunakan beberapa indikator dasar. Indikator tersebut mencakup: kesehatan, yang diukur menggunakan Angka Harapan Hidup; pengetahuan, diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; serta standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran riil per kapita. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

Jawa Barat adalah Provinsi dengan penduduk terbanyak yang memiliki dari 18 Kabupaten. Menurut (BPS Provinsi Jawa Barat, 2023) jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sekitar 49.935.858 jiwa. Hal ini berpengaruh pada laju pembangunan manusia Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 peningkatan IPM tumbuh melambat diakibatkan adanya pandemi covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2020). Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian di dunia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Pemberlakuan kebijakan yang dilaksanakan mengakibatkan berkurangnya kegiatan perekonomian. Dalam rentang waktu 4 tahun IPM Provinsi Jawa Barat tumbuh sebesar 1,09 poin. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat, tidak lepas dari peningkatan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan IPM, Provinsi Jawa Barat memiliki 27 program unggulan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2023). Menurut (Badan Pusat Statistik, 2018) status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yakni rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Berdasarkan klasifikasi dari BPS tersebut, nilai IPM Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2022 termasuk kategori tinggi. Meski memperoleh Indeks Pembangunan Manusia status tinggi, terdapat beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan perolehan IPM berstatus sedang.

Tabel 1. Kategori IPM dan Luas Wilayah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

| No | Kabupaten/kota | IPM | Kategori IPM | Luas Wilayah (km ²) |
|----|------------------|-------|---------------|---------------------------------|
| 1 | Kota Bandung | 82,5 | sangat tinggi | 167,67 |
| 2 | Kota Bekasi | 82,46 | sangat tinggi | 206,61 |
| 3 | Kota Depok | 81,86 | sangat tinggi | 200,29 |
| 4 | Kota Cimahi | 78,77 | tinggi | 39,27 |
| 5 | Kota Bogor | 77,17 | tinggi | 118,5 |
| 6 | Kota Cirebon | 75,89 | tinggi | 37,36 |
| 7 | Kota Sukabumi | 75,4 | tinggi | 48,25 |
| 8 | Bekasi | 75,22 | tinggi | 1.224,88 |
| 9 | Kota Tasikmalaya | 73,83 | tinggi | 171,61 |
| 10 | Bandung | 73,16 | tinggi | 1.767,96 |
| 11 | Sumedang | 72,69 | tinggi | 1.518,33 |
| 12 | Kota Banjar | 72,55 | tinggi | 113,49 |
| 13 | Karawang | 71,74 | tinggi | 1.652,20 |
| 14 | Purwakarta | 71,56 | tinggi | 825,74 |
| 15 | Ciamis | 71,45 | tinggi | 1.414,71 |
| 16 | Bogor | 71,2 | tinggi | 2.710,62 |
| 17 | Kuningan | 70,16 | tinggi | 1.110,56 |

| No | Kabupaten/kota | IPM | Kategori IPM | Luas Wilayah (km2) |
|----|----------------|-------|--------------|--------------------|
| 18 | Cirebon | 70,06 | tinggi | 984,52 |
| 19 | Subang | 69,87 | sedang | 1.893,95 |
| 20 | Bandung Barat | 69,04 | sedang | 1.305,77 |
| 21 | Pangandaran | 69,03 | sedang | 1.010,00 |
| 22 | Majalengka | 68,56 | sedang | 1.204,24 |
| 23 | Indramayu | 68,55 | sedang | 2.040,11 |
| 24 | Sukabumi | 67,64 | sedang | 4.145,70 |
| 25 | Garut | 67,41 | sedang | 3.074,07 |
| 26 | Tasikmalaya | 66,84 | sedang | 2.551,19 |
| 27 | Cianjur | 65,94 | sedang | 3.840,16 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (data diolah)

Pada tabel 1.1 menunjukkan terdapat 3 Kota di Provinsi Jawa Barat mendapat kategori IPM sangat tinggi pada tahun 2022 dengan luas wilayah yang tergolong kecil yaitu Kota Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Depok. IPM dengan kategori tinggi dicapai oleh 15 Kabupaten/kota di Jawa Barat. Kota Bandung dengan luas wilayah sebesar 167,67 km² memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi yaitu sebesar 82,5 dan termasuk IPM terbesar di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Adapun 9 Kabupaten yang termasuk kategori IPM sedang yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Cianjur. Kabupaten tersebut memiliki wilayah yang cukup luas yaitu lebih dari 1000 km² dengan IPM kategori sedang diatas 60 persen, namun belum dapat dikatakan baik, sehingga perlu mendapat lebih banyak prioritas penanganan untuk dapat disejajarkan dengan kabupaten/kota lain. Kabupaten Cianjur dengan luas wilayah 3.840,16 km² memiliki nilai IPM sebesar 65,94 persen pada tahun 2022. Selanjutnya Kabupaten Sukabumi dengan wilayah terluas di Provinsi Jawa Barat yaitu 4.145,70 km² memiliki IPM sebesar 67,64 persen pada tahun 2022.

Pemerintah daerah di Kabupaten/kota dengan luas wilayah yang kecil lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas pembangunan daerah. Daerah yang memiliki luas wilayah yang besar akan membutuhkan fasilitas lebih banyak dibandingkan daerah dengan luas yang kecil. Selain itu, daerah dengan wilayah yang luas akan membutuhkan lebih banyak akses untuk mendapatkan fasilitas seperti pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pelosok atau daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Wilayah yang jauh dari pusat kota lebih sulit mendapatkan fasilitas seperti pendidikan, dan kesehatan karena terbatasnya akses sehingga berpengaruh terhadap pembangunan daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten dengan luas wilayah yang besar cenderung memiliki IPM yang kecil, sedangkan kota dengan luas wilayah yang kecil memiliki nilai IPM yang cenderung tinggi. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaruh jumlah sekolah per luas wilayah, jumlah rumah sakit per luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin per luas wilayah terhadap IPM di Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022? (2) Berapa besar pengaruh jumlah sekolah per luas wilayah, jumlah rumah sakit per luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin per luas wilayah terhadap IPM di Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel menggunakan bantuan *software* Eviews 12. Data *time serie* yang digunakan adalah data tahunan selama 3 tahun yaitu tahun 2020-2022. Data *cross section* yang digunakan sebanyak 18 yang menunjukkan jumlah Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik, jurnal, serta instansi-instansi yang terkait dengan topik penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji regresi data panel dengan metode terpilih yaitu metode *Fixed Effect Model*, didapatkan hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Uji Estimasi Model

| Variabel Terikat : Y | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------------|
| Variabel Bebas | Koefisien | T-Stat | Prob | Keterangan |
| C | 53.31380 | 11.77618 | 0.0000 | Berpengaruh |
| X1 | 8.165343 | 0.139010 | 0.8903 | Tidak Berpengaruh |
| X2 | 17.08688 | 3.152609 | 0.0034 | Berpengaruh |
| X3 | 0.061159 | 0.004526 | 0.9964 | Tidak Berpengaruh |
| R2 | 0.977452 | | | |
| Durbin Watson | 1.937134 | | | |
| F-Stat | 71.52601 | | | |
| Prob F-Stat | 0.000000 | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Eviews 12

Berdasarkan tabel di atas X1 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.8903, nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.8903 > 0,05$) dengan perhitungan $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ dan $Prob < 0,05$ ($0.139010 < 1.67591$ dan $prob\ 0.8903 > 0,05$) artinya X1 tidak berpengaruh terhadap Y hal ini dikarenakan banyak Kabupaten belum memenuhi standar fasilitas kesehatan bahkan jauh di bawah standar terutama jarak tempat tinggal warga ke fasilitas kesehatan khususnya di Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas sehingga masyarakat sulit mendapat akses untuk mendapat pelayanan kesehatan. Secara umum standar jarak ke fasilitas kesehatan yang sering digunakan adalah 2km, sedangkan standar waktu yang harus di tempuh ke fasilitas kesehatan yaitu 30 menit. Namun, faktanya Kabupaten di Provinsi Jawa Barat belum memenuhi standar fasilitas kesehatan khususnya jarak dari permukiman masyarakat ke fasilitas kesehatan.

Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah yang kecil sebesar 984 km² dan hanya memiliki jumlah rumah sakit atau puskesmas per standar 2km sebesar 0,3 unit/2km. Sedangkan jumlah rumah sakit atau puskesmas terendah per standar 2km terdapat di 11 Kabupaten dengan jumlah rumah sakit atau puskesmas per standar 2km yaitu 0,1 unit/2km. Meskipun kualitas pelayanan kesehatan meningkat namun kesenjangan antar wilayah, tingkat perekonomian, serta antar perkotaan dan pedesaan masih tinggi. Keadaan layanan dan fasilitas pendukung kesehatan masih rendah akibat distribusi yang belum merata. Jumlah sarana kesehatan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia (Hidayati, 2022). Ketidakmerataan fasilitas kesehatan menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Pembangunan sarana kesehatan banyak difokuskan di daerah perkotaan atau tempat sentral, sehingga di pelosok daerah atau wilayah yang jauh dari tempat sentral menjadi sulit menjangkau sarana kesehatan. Pembangunan infrastruktur kesehatan di wilayah pelosok menunjukkan adanya perkembangan namun belum mencapai target yang diharapkan dan masih jauh dari standar serta masih terkesan lamban, sehingga tidak dapat mempengaruhi IPM. Fasilitas kesehatan tidak berpengaruh terhadap IPM karena penambahan sarana tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, sehingga tidak mampu mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Aini et al., 2016)

X2 memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0034, nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0,0034 < 0,05$) dan nilai koefisien 17.08688 (positif) dengan perhitungan $t_{Hitung} >$ dari t_{Tabel} dan $Prob < 0,05$ ($3.152609 > 1.67591$ dan $prob\ 0,00 < 0,05$) artinya X2 berpengaruh positif terhadap Y dengan nilai koefisien sebesar 17.08688. Ketika rasio jumlah sekolah per luas wilayah meningkat sebesar 1% maka IPM akan meningkat sebesar 17% hal ini dikarenakan jumlah sekolah per luas wilayah di Kabupaten Provinsi Jawa Barat, sudah memenuhi standar jarak yang ditetapkan terutama pada jenjang Sekolah Dasar. Seperti yang diketahui dalam peraturan Mendiknas No.24 tahun 2007 standar jarak tempuh murid ke sekolah maksimum

3km. Semakin mudahnya akses pendidikan di suatu wilayah akan meningkatkan angka partisipasi, serta dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah di suatu daerah, sehingga dapat meningkatkan IPM. Jumlah sekolah dasar dan SLTP berpengaruh terhadap IPM (Amrizal, 2022). Penyebaran dan pemerataan fasilitas pendidikan khususnya jumlah sekolah akan memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan

X3 memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9964, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.9964 > 0,05$) dengan perhitungan $t_{Hitung} >$ dari t_{Tabel} dan $Prob < 0,05$ ($0.004526 < 1.67591$ dan $prob 0.9964 > 0,05$) artinya X3 tidak berpengaruh terhadap Y hal ini disebabkan keterbatasan akses lapangan pekerjaan terutama di daerah terpencil di Kabupaten dengan luas wilayah yang besar, dan penduduk khususnya di daerah pelosok memerlukan biaya transportasi yang besar untuk dapat ke tempat kerja, serta dengan pendapatan yang rendah penduduk sulit meningkatkan aspek lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Faktor yang dapat mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat adalah jarak tempat tinggal ke tempat kerja. Saat ini banyak lapangan kerja yang terdapat di pusat kota sehingga penduduk di daerah terpencil harus menempuh jarak untuk sampai ke tempat kerja dibandingkan dengan penduduk daerah perkotaan. Pendapatan masyarakat berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan. Apabila masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin meningkatnya tingkat konsumsi seseorang maka kondisi ekonomi dan kesejahteraannya mengalami peningkatan. Kemiskinan tidak mempengaruhi ketimpangan, berarti bahwa bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk miskin tidak akan mempengaruhi ketimpangan (Andiny & Mandasari, 2017). Kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat menunjukkan banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Selain biaya transportasi, biaya hidup juga terus meningkat seperti harga bahan-bahan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan yang tinggi, sehingga banyak penduduk yang tergolong tidak miskin tetapi masih rentan terhadap kemiskinan dan masyarakat miskin sulit memperbaiki kualitas hidupnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Luas Wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pasca covid-19 (studi kasus 18 Kabupaten tahun 2020-2022) maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Variabel yang mempengaruhi IPM adalah jumlah sekolah per luas wilayah, sedangkan jumlah rumah sakit dan puskesmas per luas wilayah serta jumlah penduduk miskin per luas wilayah tidak memiliki pengaruh terhadap ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia, karena jumlah rumah sakit dan puskesmas masih jauh dari standar fasilitas yang ditetapkan, sementara jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap IPM dikarenakan akses kegiatan ekonomi per luas wilayah yang jauh. (2) Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi jumlah rumah sakit dan puskesmas per luas wilayah, jumlah sekolah per luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin per luas wilayah secara bersama mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada IPM di 18 Kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2022 sebesar 96,37%

Daftar Pustaka

- Aini, D. N., Harianto, & Puspitawati, H. (2016). Ketimpangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pembangunan Manusia Di Kota Depok (1st ed., Vol. 8). Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.
- Amrizal, A. (2022). Analisis disparitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi (Model regresi data panel 11 Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018). Jurnal Paradigma Ekonomika, 17(2), 235–246. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i2.10154>
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh (2nd ed., Vol. 1). Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI).

Anggraini, Y. (2018). Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia (Tim Indocamp (ed.)). .

Badan Pusat Statistik. (2018). Indeks Pembangunan Manusia.

Badan Pusat Statistik. (2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Pada Tahun 2020 Mencapai 71,94 (1st ed., Vol. 97). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/>.

BPS Provinsi Jawa Barat. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2018-2020. . <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.

Hidayati, S. N. (2022). Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2020 (3rd ed., Vol. 1). Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2023). Program Unggulan. <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/program-unggulan>.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi.

UNDP. (2023). Human Development Report.